PEMERINTAH PROVISI RIAU

LKJiP

(Laporan Kinerja Instansi Pemerintah)

TAHUN 2017

DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI RIAU

TAHUN 2018

IKHTISAR EKSKUTIF

Dalam rangka pertanggungjawaban pencapaian kinerja Pelaksanaan Program Tahun 2017 pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai ukuran pencapaian sasaran penetapan Kinerja oleh Kepala Dinas dengan Gubernur Riau.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau pada Tahun 2017, didukung APBD sebesar Rp. 18.885.125.504,47,-, secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut:

a. Belanja Tidak Langsung, sebesar Rp. 10.215.469.624,0,- digunakan untuk Belanja Gaji, Tunjangan Pegawai dan Tambahan Penghasilan Pegawai.
b. Belanja Langsung, sebesar Rp. 8.669.655.880,47,- digunakan untuk :
   - Belanja Pegawai, sebesar Rp. 509.825.000,00
   - Belanja Barang dan Jasa, sebesar Rp. 7.412.119.520,47
   - Belanja Modal, sebesar Rp. 747.711.360,00,-

Pada LKjIP ini memuat Gambaran umum, Penetapan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2017, adapun Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1	Tercapainya Ketersediaan Pangan	Jumlah Ketersediaan pangan (Energi)	2.400 Kkal/kap/hr
		Jumlah Ketersediaan Pangan (Protein)	63 gr/kap/hr
		Skor PPH	83
2	Tercapainya Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat	Jumlah Cadangan Pangan (Beras)	164 ton
3	Tercapainya Ketersediaan Informasi, Pasokan, Harga dan Akses Pangan Strategis di Daerah	Persentase Ketersediaan Informasi Harga Pangan	100%
4	Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat	Jumlah Konsumsi Energi	2150 Kkal/kap/hr
		Jumlah Konsumsi Protein	57 Gr/Kap/Hr
		Skor PPH	82,5
5	Tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pangan	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan	80%

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis terhadap pencapaian kinerja sasaran diperoleh capaian kinerja sasaran sebesar 96 %, dapat dikategorikan Baik. Sasaran tersebut dicapai melalui pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dianggap relevan dengan hasil capaian berdasarkan sasaran yaitu: sasaran 1. 129%; sasaran 2. 38,62 %; sasaran 3. 100 %; sasaran 4. 97 %; sasaran 5. 109 %.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rakhmat dan hidayah-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Tahun 2017 sebagaimana diamanatkan Inpres No 7 tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah selesai disusun.

Dengan tersusunnya laporan ini, yang secara umum berpedoman pada sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) diharapkan berbagai kebijaksanaan dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau dapat diketahui secara luas, sehingga dapat dijadikan media dalam pengambilan keputusan dan perbaikan guna tercapainya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok & fungsi (tupoksi) masing-masing bagian.

Dan sebagai pedoman penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan Keputusan Kepala Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pengganti dari Keputusan Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99.

Oleh karenanya laporan ini juga dapat dipergunakan sebagai alat untuk mengevaluasi diri khususnya Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinya yang berguna bagi perencanaan dan peningkatan kinerja masing-masing bagian.

Pada kesempatan ini pula kami sampaikan ucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Tim Penyusun yang telah memberikan sumbang pikiran dan tenaga sehingga laporan ini dapat terselesaikan.

Kritik dan Saran senantiasa kami harapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan dan semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau dapat memberikan manfaat bagi yang berkepentingan.

Pekanbaru, Februari 2018

Kepala Dinas

PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS KETAHANAN PANGAN

Ir. DARMANSYAH
NIP. 195902071985031009

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSKUTIF ____ *i*

KATA PENGANTAR ____ *iii*

DAFTAR ISI ____ *iv*

BAB I PENDAHULUAN ____ *5*

A. Gambaran Umum Organisasi ____ **5**

B. Fungsi Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau ____ **23**

C. Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau ____ **24**

BAB II PERENCANAAN KINERJA ____ *25*

A. Perencanaan Kinerja ____ **25**

B. Perjanjian Kinerja ____ **28**

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017 ____ *30*

A. Capaian Kinerja Organisasi ____ **30**

B. Capaian Sasaran ____ ***33***

C. Realisasi Anggaran ____ **39**

BAB IV PENUTUP ____ *46*

DAFTAR LAMPIRAN

1. **Rencana Kerja Tahunan**
2. **Pengukuran Kinerja Kegiatan**
3. **Perjanjian Kinerja**

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 04 Tahun 2016 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau, Dinas Ketahanan Pangan Tipe A, menyelenggarakan urusan di bidang pangan. Dinas Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau yang mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, Bidang Konsumsi, dan Penganekaragaman Pangan, dan Bidang Keamanan Pangan;
2. Pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, Bidang Konsumsi, dan Penganekaragaman Pangan, dan Bidang Keamanan Pangan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan, dan Bidang Keamanan Pangan;
4. Pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, Bidang Konsumsi, dan Penganekaragaman Pangan, dan Bidang Keamanan Pangan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, didukung oleh 5 (lima) unit kerja

Eselon III yang dibantu oleh 3 (tiga) Eselon IV sebagaimana terlihat pada tugas pokok dan fungsi sekretariat dan setiap bidang adalah sebagaimana terlihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Struktur Organisasi
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau

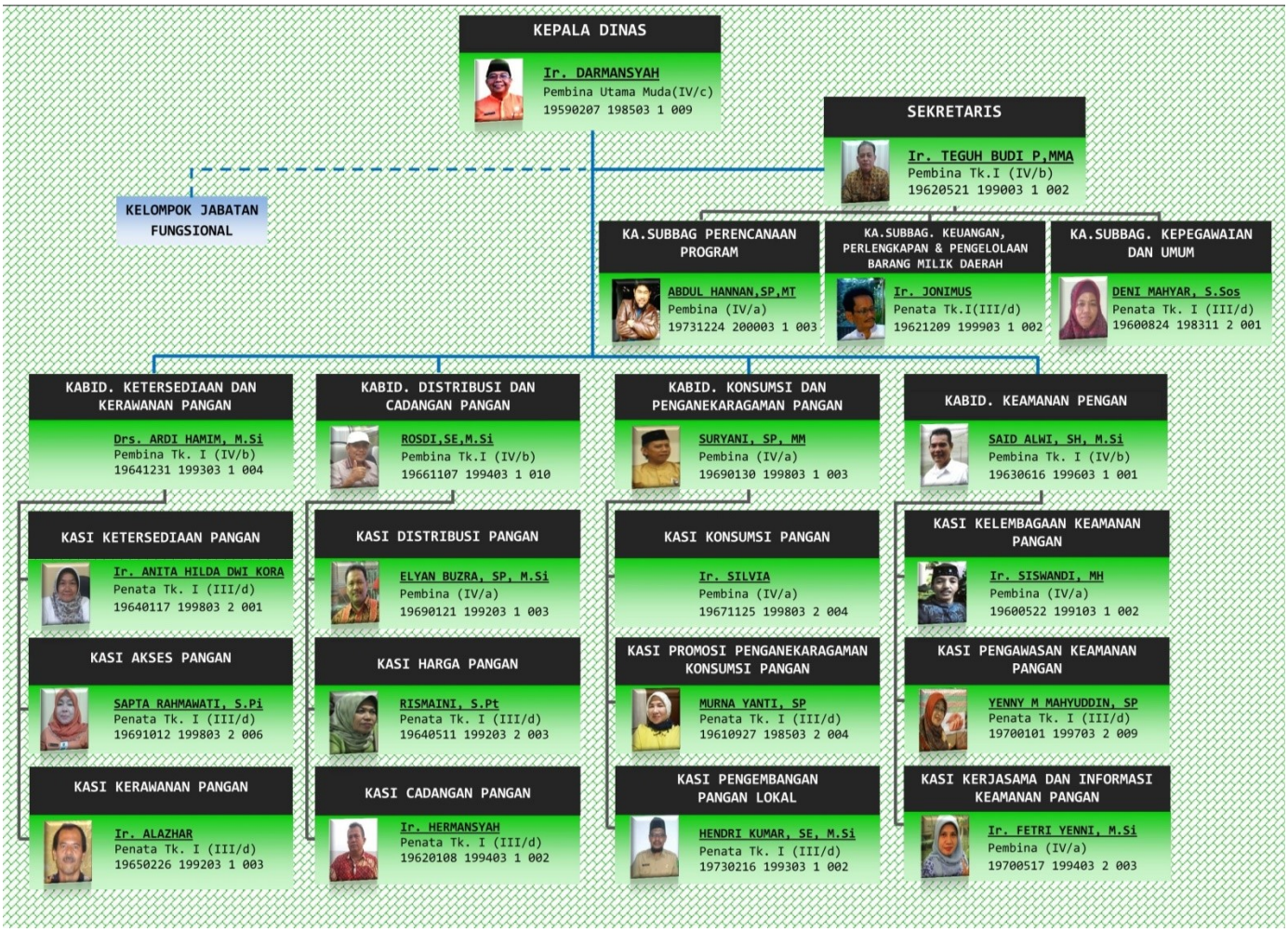

Tugas pokok dan fungsi setiap Unit Kerja Eselon pada Dinas Ketahanan Pangan, terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan, dan Bidang Kelembagaan Pa Keamanan Pangan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

A. Kepala Dinas

a. Kepala Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah pada bidang Ketahanan Pangan.
b. Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi pada Dinas Ketahanan Pangan.

B. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Perencanaan Program, Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Subbagian Kepegawaian dan Umum.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Sekretariat;
b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat;
a. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan; dan
c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretaris membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu : 1). Subbagian Perencanaan Program, 2). Subbagian Keuangan, Perlengkapan, dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan 3). Subbagian Kepegawaian dan Umum. Masing-masing Subbagian dipimpin oleh Kepala Sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

1. **Kepala Subbagian Perencanaan Program** mempunyai tugas :
   a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Perencanaan Program;
   b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Perencanaan Program;
   c. menyiapkan bahan dan menghimpun usulan rencana program/kegiatan dari masing-masing bidang;
   d. melaksanakan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah unit kerja;
   e. melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur;
   f. mempersiapkan bahan-bahan untuk pra-rapat koordinasi dan rapat koordinasi musyawarah perencanaan pembangunan daerah serta rapat koordinasi teknis;
   g. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Perencanaan Program; dan
   h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2. **Kepala Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah** mempunyai tugas :
   a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;

b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
c. melakukan urusan perbendaharaan dan akuntansi keuangan dan aset;
d. mengelola keuangan dan penyiapan pembayaran gaji pegawai;
e. melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis pengelolaan keuangan dan aset;
f. menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
g. melakukan urusan pengurusan barang milik daerah yang berada pada penguasaan Dinas Ketahanan Pangan;
h. melaksanakan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan atau pemutakhiran data hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan;
i. melaksanakan proses administrasi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;
j. melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban anggaran;
k. melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dan pencatatan aset;
l. melakukan fasilitasi rencana umum pengadaan barang dan jasa unit kerja;
m. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3. **Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum** mempunyai tugas :
a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Kepegawaian dan Umum;
b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Kepegawaian dan Umum;

c. mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat;
d. melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian;
e. melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan;
f. melaksanakan proses penegakan disiplin pegawai;
g. membuat laporan perkembangan kepegawaian;
h. menyelenggarakan urusan kehumasan;
i. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
j. melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;
k. melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana kantor setelah berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
l. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
m. mengumpulkan, menyusun dan mengolah bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;
n. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

C. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Ketersediaan Pangan, Seksi Akses Pangan, dan Seksi Kerawanan Pangan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;

b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada kepala Dinas Ketahanan Pangan; dan
d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

1. **Kepala Seksi Ketersediaan Pangan** mempunyai tugas :
   a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Ketersediaan Pangan;
   b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Ketersediaan Pangan;
   c. melakukan pemberdayaan kelompok pengolahan pangan dan pengolahan pangan alternatif dalam meningkatkan ketersediaan pangan;
   d. melaksanakan identifikasi, pengumpulan, pengolahan, data, ketersediaan, analisis situasi pangan dan keragaman produk pangan;
   e. menyusun Angka Kecukupan Gizi, Pola Pangan Harapan tingkat ketersediaan pangan, prognosa ketersediaan pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional, dan penyusunan Neraca Bahan Makanan;
   f. melakukan koordinasi pencegahan dan pengendalian masalah ketersediaan pangan;
   g. melakukan pengembangan jaringan informasi dan kerjasama ketersediaan pangan wilayah;
   h. melakukan penyediaan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana bidang ketersediaan pangan;
   i. melakukan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia bidang ketersediaan pangan;

j. menyusun kegiatan analisis ketersediaan pangan menyangkut penyediaan dan pengolahan data dalam neraca bahan makanan;
k. menyusun analisis Responsif dan Antisipatif Ketersediaan Pangan daerah;
l. melakukan penyediaan dan publikasi pengembangan pangan alternatif daerah;
m. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Ketersediaan Pangan; dan
n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2. **Kepala Seksi Akses Pangan** mempunyai tugas :
a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Akses Pangan;
b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Akses Pangan;
c. melakukan penyediaan sarana dan prasarana akses pangan di daerah terisolir;
d. melakukan pengembangan dan penguatan kelembagaan kelompok masyarakat dalam penyediaan pangan;
e. merancang dan memfasilitasi komoditi pangan dengan harga terjangkau di masyarakat;
f. menyusun bahan pengumpulan, pengolahan, identifikasi, dan analisis akses pangan;
g. melakukan monitoring, pembinaan kepada kelompok, gabungan kelompok tani dan pelaku usaha akses pangan;
h. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Akses Pangan; dan
i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3. **Kepala Seksi Kerawanan Pangan** mempunyai tugas :
   a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Kerawanan Pangan;
   b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Kerawanan Pangan;
   c. melakukan penyusunan peta kerawanan pangan;
   d. melakukan koordinasi pencegahan terjadinya kerawanan pangan;
   e. melakukan pemberdayaan dan intervensi daerah rawan pangan;
   f. melakukan pembinaan dan pengembangan kelompok kemandirian pangan;
   g. melakukan penyusunan profil kerawanan pangan;
   h. menyiapkan bahan perumusan kebijakan penanganan kerawanan pangan daerah;
   i. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Kerawanan Pangan; dan
   j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

D. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan

Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Seksi Distribusi Pangan, Seksi Harga Pangan, dan Seksi Cadangan Pangan.

Untuk melaksanakan tugas-tugasnya, Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan;
b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan;
c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada kepala Dinas Ketahanan Pangan; dan

d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

1. **Kepala Seksi Distribusi Pangan** mempunyai tugas :
   a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Distribusi Pangan;
   b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Distribusi Pangan;
   c. melakukan penguatan, jaringan distribusi pangan dari produsen ke konsumen;
   d. menyusun bahan identifikasi, pengumpulan, pengolahan, dan analisis situasi distribusi pangan;
   e. melakukan pembinaan, pengembangan, evaluasi manajemen lembaga distribusi pangan masyarakat;
   f. melakukan pembinaan, identifikasi jaringan pasar, dan pengembangan sistem informasi distribusi pangan;
   g. melakukan pengawasan dan pengembangan distribusi pangan;
   h. menyusun bahan identifikasi, analisis, dan pengembangan sarana dan prasarana distribusi pangan;
   i. melakukan fasilitasi distribusi pangan;
   j. Melakukan penguatan kelompok kelembagaan distribusi pangan;
   k. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Distribusi Pangan; dan
   l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2. **Kepala Seksi Harga Pangan** mempunyai tugas :
   a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Harga Pangan;
   b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Harga Pangan;
   c. menyusun bahan identifikasi, pengumpulan, dan pengolahan data dan menyusun informasi harga pangan;
   d. melakukan intervensi stabilisasi harga pangan;

e. melakukan penguatan pelaku usaha pangan masyarakat;
f. melakukan pemantauan dan analisis harga pangan di tingkat produsen, distributor, dan pedagang pangan;
g. menyiapkan bahan perumusan kebijakan Harga pangan provinsi dan melaksanakan program aksi;
h. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Harga Pangan; dan
i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3. **Kepala Seksi Cadangan Pangan** mempunyai tugas :
a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Cadangan Pangan;
b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Cadangan Pangan;
c. melakukan penyediaan, pengelolaan dan penguatan cadangan pangan pemerintah daerah dan cadangan pangan masyarakat;
d. melakukan pembinaan dan pemberdayaan lumbung pangan kelompok dan gapoktan;
e. melakukan identifikasi dan validasi kebutuhan cadangan pangan terkait bantuan gagal panen dan bantuan bencana alam;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha pangan;
g. melakukan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyediaan cadangan pangan;
h. melakukan kerjasama dalam pengelolaan dan pemenuhan cadangan pangan pemerintah;
i. menyiapkan bahan perumusan kebijakan cadangan pangan di daerah;
j. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Cadangan Pangan; dan
k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

E. Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan

Kepala Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Seksi Konsumsi Pangan, Seksi Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan, dan Seksi Pengembangan Pangan Lokal.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan;
b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan;
c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan; dan
d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

1. **Kepala Seksi Konsumsi Pangan** mempunyai tugas:
   a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Konsumsi Pangan;
   b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Konsumsi Pangan;
   c. melakukan pembinaan dan analisis situasi kebutuhan konsumsi pangan masyarakat;
   d. melakukan pembinaan peningkatan mutu konsumsi pangan masyarakat;
   e. melaksanakan pola dan intervensi konsumsi pangan masyarakat;
   f. menyusun bahan Sosialisasi untuk peningkatan pengetahuan, keterampilan dan perubahan sikap terhadap pentingnya konsumsi pangan;
   g. melakukan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia bidang konsumsi pangan;
   h. menyiapkan bahan perumusan kebijakan konsumsi pangan;

i. melakukan peningkatan kualitas infrastruktur bidang konsumsi pangan;
j. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Konsumsi Pangan; dan
k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

1. **Kepala Seksi Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan** mempunyai tugas:
   a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
   b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
   c. melakukan pengembangan penganekaragaman pangan;
   d. melakukan peningkatan kemampuan kelompok wanita dalam percepatan diversifikasi pangan;
   e. menyusun bahan sosialisasi dan edukasi kepada anak sekolah, kelompok wanita, tentang penganekaragaman konsumsi pangan dalam rangka percepatan diversifikasi;
   f. melakukan kerja sama pecepatan pengembangan penganekaragaman pangan;
   g. menyiapkan bahan rumusan kebijakan pengembangan usaha kelembagaan penganekaragaman pangan;
   h. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan; dan
   i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3. **Kepala Seksi Pengembangan Pangan Lokal** mempunyai tugas:
   a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pengembangan Pangan Lokal;

b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengembangan Pangan Lokal;
c. melakukan pengembangan dan pelestarian budaya mengkonsumsi pangan lokal;
d. melakukan pembinaan peningkatan nilai tambah produk pangan lokal;
e. melakukan peningkatan partisipasi industri yang mengelola usaha pangan khas daerah;
f. melakukan peningkatan penggunaan teknologi industri yang mengelola usaha pangan khas daerah;
g. melakukan kerja sama rekayasa, peningkatan jenis dan mutu pangan lokal;
h. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pengembangan Pangan Lokal; dan
i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

F. Bidang Keamanan Pangan

Kepala Bidang Keamanan Pangan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Seksi Kelembagaan Keamanan Pangan, Seksi Pengawasan Keamanan Pangan, dan Seksi Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Keamanan Pangan;
b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Keamanan Pangan;
c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan; dan
d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

1. **Kepala Seksi Kelembagaan Keamanan Pangan mempunyai tugas:**
   a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Kelembagaan Keamanan Pangan;
   b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Kelembagaan Keamanan Pangan;
   c. melakukan Identifikasi, pengumpulan, pengolahan, dan analisis mutu dan standarisasi pangan segar;
   d. melakukan pembinaan mutu, sarana dan prasarana serta standarisasi pangan segar;
   e. melakukan fasilitasi penetapan standarisasi pangan segar;
   f. menyiapkan bahan penyusunan pengembangan kelembagaan sertifikasi produk pangan segar;
   g. melaksanakan proses administrasi penerbitan sertifikasi prima 2 dan 3 produk pangan segar dan registrasi pangan segar asal tumbuhan;
   h. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Kelembagaan Keamanan Pangan; dan
   i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2. **Kepala Seksi Pengawasan Keamanan Pangan mempunyai tugas:**
   a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pengawasan Keamanan Pangan;
   b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengawasan Keamanan Pangan;
   c. melakukan pengawasan keamanan pangan segar di tingkat petani, pasar tradisonal, dan modern;
   d. menyusun data dan bahan koordinasi penaggulangan dan pencegahan masalah keamanan pangan segar;
   e. melakukan sosialisasi dan pembinaan keamanan pangan segar pada petani, pedagang dan masyarakat;

f. melakukan dan memproses pengambilan dan pengujian sampel keamanan pangan segar di laboratorium;
g. menganalisis dan melakukan pengembangan sistem pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar lintas daerah;
h. melakukan pengembangan dan pembinaan sistem jejaring keamanan pangan;
i. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pengawasan Keamanan Pangan; dan
j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Kepala Seksi Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan mempunyai tugas :

a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan;
b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan;
c. melakukan fasilitasi penyebarluasan informasi keamanan pangan;
d. melakukan penyusunan dan penguatan sistem informasi keamanan pangan;
e. melakukan kerjasama lintas sektor, lintas wilayah, dan stakeholder terkait keamanan pangan;
f. melakukan koordinasi dan tindak lanjut hasil-hasil pengawasan keamanan pangan;
g. menyiapkan bahan perumusan kebijakan terjadinya ketidakamanan konsumsi pangan;
h. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan; dan

a. i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau didukung oleh kekuatan sumberdaya manusia sebanyak 77 orang. Terdiri dari 21 pejabat eselon, yaitu : 1 orang pejabat eselon II, 5 orang pejabat eselon III, 15 orang eselon IV dan 52 orang staf, yang berdasarkan kepangkatan dan golongan terinci sebagai berikut :

Gambar 2.
PNS berdasar Pangkat dan Golongan
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau Tahun 2017

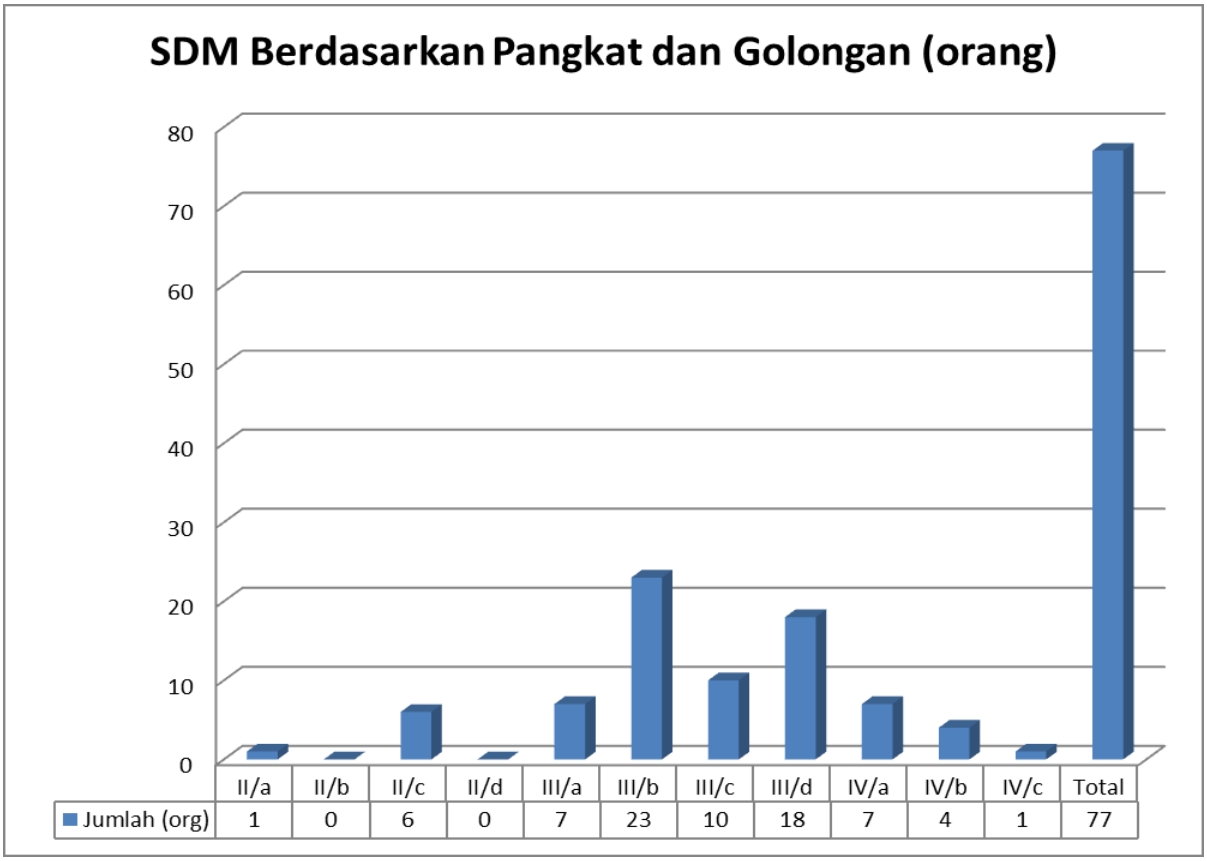

	II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	Total
Jumlah (org)	1	0	6	0	7	23	10	18	7	4	1	77

PNS berdasar Tingkat Pendidikan
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau Tahun 2017

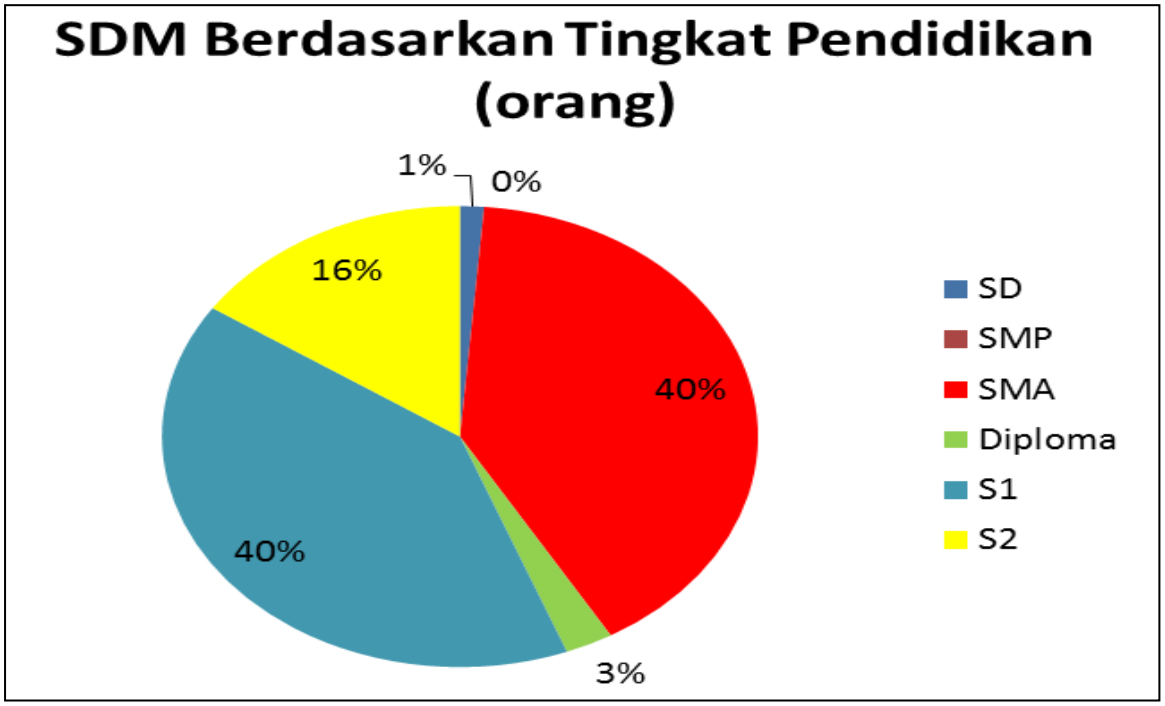

Berdasarkan tingkat pendidikan, jumlah pegawai pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

1.	SD	=	1
2.	SLTP	=	0
3.	SLTA	=	31
4.	DIPLOMA	=	2
5.	S.1	=	31
6.	S.2	=	12
	JUMLAH	**=**	**77**

1. Ruang kerja : Terdapat 14 ruangan kerja, yang terdiri dari 1 ruang kerja Kepala Badan, 1 ruang kerja Sekretaris, 4 ruang kerja Kepala Bidang, dan sisanya ruang kerja Eselon IV dan Staf sejumlah 8 ruangan
2. Aula, Mushola dan Gudang

3. Peralatan kerja : Komputer PC 56 unit, laptop 26 unit, Printer 62 unit, Scanner 6 unit, Proyektor/LCD 5 unit
4. Peralatan Kantor : Meja kerja 134 buah, kursi kerja 155 buah

B. *Fungsi Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau*

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsinya Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau secara umum memiliki fungsi strategis yaitu: Terwujudnya Lembaga yang Handal Dalam Memantapkan Ketahanan Pangan Masyarakat yang Berbasis Sumber Daya Lokal Menuju Kemandirian Pangan.

Secara singkat Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau memiliki mandat yang harus dipertanggung jawabkan dalam kaitannya penggunaan sumber daya, yaitu :

1. Mampu mengerjakan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban dengan penuh tanggungjawab berdasarkan pada target sasaran yang telah ditetapkan;
2. Upaya mewujudkan kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang beragam, bergizi, berimbang, dan aman, serta terjangkau;
3. Berbasis sumberdaya spesifik lokasi (kearifan lokal) dan sesuai agro-ekosistem setempat dengan teknologi unggul yang berorientasi kebutuhan masyarakat;
4. Kemampuan dalam diversifikasi pangan yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.

C. *Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau*

Adapun beberapa permasalahan utama yang dihadapi dalam pembangunan ketahanan pangan dapat dirinci sebagai berikut:

1. Alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan.
2. Potensi kerawanan pangan di Provinsi Riau masih cukup tinggi diakibatkan terbatasnya infrastruktur dasar pedesaan, dan terjadinya bencana alam.
3. Ketidaklancaran proses distribusi pangan karena adanya keterbatasan sarana dan prasarana transportasi dan iklim yang tidak menentu sehingga dapat berakibat pada melonjaknya ongkos angkut, harga pangan cenderung naik dan tidak stabilnya jumlah pasokan.
4. Masih terjadinya berbagai kasus gangguan kesehatan akibat pangan yang tidak aman karena terpapar oleh cemaran secara biologi, fisik maupun penggunaan bahan kimia yang berlebihan maupun yang dilarang serta masih ditemukannya pangan kadaluarsa yang beredar di masyarakat.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

Guna mewujudkan fungsi strategis : Terwujudnya Lembaga yang Handal Dalam Memantapkan Ketahanan Pangan Masyarakat yang Berbasis Sumber Daya Lokal Menuju Kemandirian Pangan, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau merumuskan beberapa tujuan dan sasaran yang diuraikan sebagai berikut :

Tujuan:

1. Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur dan kualitas sarana prasarana perkantoran.
2. Meningkatkan koordinasi dalam perumusan kebijakan ketahanan pangan.
3. Meningkatkan kemampuan dalam membangun ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup di seluruh rumah tangga.
4. Meningkatkan cadangan pangan untuk menanggulangi keadaan darurat dan kerawanan pangan/bencana.
5. Mengembangkan sistem distribusi dan harga pangan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat.
6. Membangun kesiapan dalam mengantisipasi dan menangani kerawanan pangan.
7. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia dalam mendukung pembangunan ketahanan pangan.
8. Meningkatkan penganekaragaman pangan melalui pengembangan pangan lokal dan produk pangan olahan guna meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman.
9. Mengembangkan sistem pengawasan keamanan pangan.

Sasaran:

1. Tercapainya kapasitas sumberdaya aparatur dan kualitas sarana prasarana perkantoran.
2. Tercapainya efektifitas koordinasi perumusan kebijakan ketahanan pangan
3. Tercapainya ketersediaan pangan utama
4. Tercapainya penguatan cadangan pangan pemeritah dan masyarakat.

5. Tercapainya ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan strategis di daerah.
6. Tercapainya penanganan daerah rawan pangan.
7. Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung pembangunan ketahanan pangan.
8. Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat.
9. Tercapainya pembinaan dan pengawasan pangan.

Tabel 1.
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
Misi I. Mewujudkan Tata Kelola Lembaga yang Baik Berbasis Teknologi Informasi Didukung Oleh Sumberdaya Aparatur yang Kompeten dan Berintegritas Tinggi.			
Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur dan kualitas sarana prasarana perkantoran	Tercapainya kapasitas sumberdaya aparatur dan kualitas sarana prasarana perkantoran	Peningkatkan sistem tata kelola yang transparan berbasis teknologi informasi melalui peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran
Meningkatkan koordinasi dalam perumusan kebijakan ketahanan pangan	Tercapainya efektifitas koordinasi perumusan kebijakan ketahanan pangan	Peningkatanan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Ketahanan Pangan	Peningkatan Ketahanan Pangan
		Telaah Kebijakan Pembangunan Ketahanan Pangan	Pengembangan Data/Informasi
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
1	**2**	**3**	**4**
Misi II. Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan dan Akses Pangan Serta Penanganan Kerawanan Pangan.			
Meningkatkan kemampuan dalam membangun ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup di seluruh rumah tangga	Tercapainya ketersediaan pangan utama	Peningkatan Ketersediaan dan Pemantauan Cadangan Pangan Masyarakat	Peningkatan Ketahanan Pangan
Meningkatkan cadangan pangan untuk menanggulangi keadaan darurat dan kerawanan pangan/bencana	Tercapainya penguatan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat	Pengembangan cadangan pangan pemerintah dan Masyarakat	Peningkatan Ketahanan Pangan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
Mengembangkan sistem distribusi dan harga pangan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat	Tercapainya ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan strategis di daerah	Meningkatkan sistem distribusi pangan dan pemantauan harga pangan secara berkala	Peningkatan Ketahanan Pangan
Membangun kesiapan dalam mengantisipasi dan menangani kerawanan pangan	Tercapainya penanganan daerah rawan pangan	Peningkatan Kemandirian dan Penanganan Kerentanan Pangan di Masyarakat	Peningkatan Ketahanan Pangan
Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung pembangunan ketahanan pangan	Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung pembangunan ketahanan pangan	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung pembangunan ketahanan pangan melalui pembinaan dan pelatihan kemasyarakatan	Peningkatan Ketahanan Pangan
Misi III. Meningkatkan Penganekaragaman dan Mutu Pangan			
Meningkatkan penganekaragaman pangan melalui pengembangan pangan lokal dan produk pangan olahan guna meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat	Penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal melalui pemanfaatan pekarangan dan pengolahan pangan berbasis sumberdaya lokal	Pengembangan Diversifikasi dan Konsumsi Pangan
Mengembangkan sistem pengawasan keamanan pangan	Tercapainya pembinaan dan pengawasan pangan	Meningkatkan kesadaran pelaku usaha dan konsumen terhadap mutu dan keamanan produk pangan	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

B. *Perjanjian Kinerja*

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau pada Tahun 2017 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Gubernur Riau untuk mewujudkan target kinerja tahunan dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau telah melaksanakan 2 (dua) program utama yang masuk Urusan Ketahanan Pangan dengan 23 kegiatan didalamnya serta 5 pogram lainnya dengan 24 kegiatan yang mendukung dari APBD Provinsi Riau. Total anggaran sebesar Rp. 18.885.125.504,47,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 10.215.469.624,00,- dan Belanja Langsung Rp. 8.669.655.880,47,-

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau dengan Gubernur Riau Tahun 2017, secara lengkap tercantum pada Lampiran dibawah ini :

Tabel 2.
Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan
Provinsi RiauTahun 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1	Tercapainya Ketersediaan Pangan	Jumlah Ketersediaan pangan (Energi)	2.400 Kkal/kap/hr
		Jumlah Ketersediaan Pangan (Protein)	63 gr/kap/hr
		Skor PPH	83
2	Tercapainya Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat	Jumlah Cadangan Pangan (Beras)	164 ton
3	Tercapainya Ketersediaan Informasi, Pasokan, Harga dan Akses Pangan Strategis di Daerah	Persentase Ketersediaan Informasi Harga Pangan	100%
4	Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat	Jumlah Konsumsi Energi	2150 Kkal/kap/hr
		Jumlah Konsumsi Protein	57 Gr/Kap/Hr
		Skor PPH	82,5
5	Tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pangan	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan	80%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017

A. *Capaian Kinerja Organisasi*

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya .

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75 – 100%	Baik
3	55 – 74 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

Pada tahun 2017, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau Tahun 2017 dan Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau, terdapat 5 sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun 2017, yaitu :

Tabel 4.
Target Perjanjian Kinerja Badan Ketahanan Pangan Tahun 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1	Tercapainya Ketersediaan Pangan	Jumlah Ketersediaan pangan (Energi)	2.400 Kkal/kap/hr
		Jumlah Ketersediaan Pangan (Protein)	63 gr/kap/hr
		Skor PPH	83
2	Tercapainya Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat	Jumlah Cadangan Pangan (Beras)	164 ton
3	Tercapainya Ketersediaan Informasi, Pasokan, Harga dan Akses Pangan Strategis di Daerah	Persentase Ketersediaan Informasi Harga Pangan	100%
4	Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat	Jumlah Konsumsi Energi	2150 Kkal/kap/hr
		Jumlah Konsumsi Protein	57 Gr/Kap/Hr
		Skor PPH	82,5
5	Tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pangan	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan	80%

Tabel 5.
Capaian Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Tercapainya Ketersediaan Pangan	Jumlah Ketersediaan pangan (Energi)	2.400 Kkal/kap/hr	3.162 Kkal/kap/hr
		Jumlah Ketersediaan Pangan (Protein)	63 Gr/kap/hr	98.08 Gr/kap/hr
		Skor PPH	83	83.35
2	Tercapainya Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat	Jumlah Cadangan Pangan (Beras)	164 ton	65.33 ton
3	Tercapainya Ketersediaan Informasi, Pasokan, Harga dan Akses Pangan Strategis di Daerah	Persentase Ketersediaan Informasi Harga Pangan	100%	100%
4	Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat	Jumlah Konsumsi Energi	2150 Kkal/kap/hr	2.125 Kkal/kap/hr
		Jumlah Konsumsi Protein	57 Gr/Kap/Hr	52 Gr/kap/hr
		Skor PPH	82,5	84.5
5	Tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pangan	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan	80%	87.5 %

B. *Capaian Sasaran*

Sasaran Strategis 1 : Tercapainya ketersediaan pangan

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 1, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tercapainya Ketersediaan Pangan	Jumlah Ketersediaan pangan (Energi)	2.400 Kkal/kap/hr	3.162 Kkal/kap/hr	132
	Jumlah Ketersediaan Pangan (Protein)	63 gr/kap/hr	98.08 Gr/kap/hr	156
	Skor PPH	83	83.35	100

Capaian kinerja pada sasaran 1: Tercapainya ketersediaan pangan yang terdiri dari 3 (tiga) Indikator Kinerja telah melebihi target yang ditetapkan seperti pada abel diatas.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 1, adalah sebesar Rp 87.000.000,-. Keberhasilan pencapaian Sasaran 1 tidak terlepas dari pelaksanaan Program Peningkatan Ketahanan Pangan melalui Kegiatan Analisis Ketersediaan Pangan Wilayah. Melalui kegiatan ini Dinas Ketahanan Pangan berkoordinasi dengan instansi teknis terkait guna mewujudkan pencapaian target ini, pencapaian indikator pada sasaran ini tertuang dalam Buku Neraca Bahan Makanan (NBM)

Sasaran 2 : Tercapainya Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 2, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tercapainya Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat	Jumlah Cadangan Pangan (Beras)	164 Ton	65,33 Ton	0,40

Capaian kinerja pada sasaran strategis 2 : Tercapainya penguatan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat dengan indikator Jumlah Cadangan Pangan (Beras) belum mencapai target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja yaitu 65,33 Ton (40 %) dari target 164 Ton.

Sumber dana untuk Sasaran Strategis ini sebesar Rp. 1.238.061.350,- yang terdiri dari kegiatan :

1. Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Riau — Rp. 236.840.350,00
2. Pengembangan dan Pemberdayaan ketersediaan pangan sagu sebagai pangan alternatif — Rp. 676.264.000,00
3. Pengembangan dan Pemberdayaan Cadangan Pangan Masyarakat — Rp. 148.480.000,00
4. Pemberdayaan Gapoktan dalam Penyedia Pangan Masyarakat se-Provinsi Riau — Rp. 176.477.000,00

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010, pemerintah tingkat provinsi wajib memiliki lembaga cadangan pangan pemerintah provinsi dan menyediakan cadangan pangan pemerintah sebesar 200 Ton Ekuivalen Beras atau sebesar 60% (120 Ton Ekuivalen Beras). Berdasarkan Peraturan Menteri tersebut Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau tahun 2017 menetakan target kinerja 164 Ton atau 84 % ekuivalen beras dari standar Permentan 65 tahun 2010

Sasaran 3 : Tercapainya Ketersediaan Informasi, Pasokan, Harga dan Akses Pangan Strategis di Daerah.

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 3, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tercapainya Ketersediaan Informasi, Pasokan, Harga dan Akses Pangan Strategis di Daerah	Persentase Ketersediaan Informasi Harga Pangan	100%	100%	100

Capaian kinerja pada sasaran 3 : Tercapainya ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan strategis di daerah dengan indikator kinerjanya Persentase ketersediaan informasi harga pangan telah sesuai target yang ditetapkan. Capaian kinerja pada sasaran ini sebesar 100%. Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 3, adalah sebesar Rp. 487.484.000,00,-

Keberhasilan pencapaian Sasaran 3 tidak terlepas dari pelaksanaan Program Peningkatan Ketahanan Pangan dengan Kegiatan :

1. Penguatan Jaringan Distribusi Pangan dan antar Wilayah (Lokal dan Regional) Rp. 141.761.900,00
2. Pemantauan dan Analisis Akses Harga Pangan Pokok Rp. 100.000.000,00
3. Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) Rp. 245.722.100,00

Penguatan Jaringan Distribusi Pangan dan antar Wilayah (Lokal dan Regional) dan Kegiatan Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok.

Melalui Kegiatan Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok, informasi harga, pasokan dan akses pangan dikumpulkan secara rutin atau periodik oleh provinsi dan 12 kabupaten/kota untuk dapat digunakan sebagai bahan pembuatan analisis perumusan kebijakan yang terkait dalam distribusi pangan yang mencakup komoditas beras, kedelai, cabai merah keriting, bawang merah, telur ayam ras, daging ayam ras,

daging sapi yang disajikan mingguan/bulanan yang berada di tingkat produsen dan konsumen.

Untuk menjaga stabilitas harga pangan agar pangan dapat terjangkau oleh masyarakat dilaksanakan berbagai upaya seperti koordinasi lintas sektor, pemantauan dan rakor terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), serta terselenggaranya pasar murah. Pada Kegiatan Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok dilaksanakan dengan memfasilitasi 24 gapoktan di 12 Kabupaten/Kota dalam bentuk gabah sebagai sarana tunda jual dan benih padi.

Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 4, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat	Jumlah Konsumsi Energi	2150 Kkal/kap/hr	2.125 Kkal/kap/hr	99
	Jumlah Konsumsi Protein	57 Gr/Kap/Hr	52 Gr/kap/hr	91
	Skor PPH	82,5	84.5	102

Pada sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan masyarakat, dapat diukur melalui Skor Pola Pangan Harapan (PPH), yaitu komposisi kelompok pangan utama yang dikonsumsi berdasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. Penghitungan Skor PPH dimaksudkan untuk menganalisis situasi konsumsi pangan suatu masyarakat terhadap pola konsumsi pangan yang ideal (Pola Pangan Harapan). Capaian kinerja pada sasaran ini telah melebihi target Skor PPH yaitu tercapai 102 %. Skor PPH Provinsi Riau Tahun 2017 sebesar 84,5 sudah melebihi target yang telah ditetapkan 82,5.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 4, adalah sebesar Rp. 2.033.825.350,00,-. Keberhasilan pencapaian Sasaran 4 tidak terlepas dari pelaksanaan Program Ketahanan Pangan dengan Kegiatan :

1. Gerakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Rp. 845.510.000,00
2. Lomba Cipta Menu B2SA Tingkat Provinsi dan Nasional	Rp. 281.473.000,00
3. Analisis Situasi Konsumsi Pangan Penduduk	Rp. 139.910.000,00
4. Pengelolaan Pemanfaatan Pekarangan/ Peran Perempuan dalam ketahanan pangan	Rp. 662.014.850,00
5. Pengembangan Pangan Lokal	Rp. 104.917.500,00

Sasaran 5 : Tercapainya pembinaan dan pengawasan pangan

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 5, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pangan	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan	80%	87.5 %	107

Capaian kinerja pada sasaran 5 : Tercapainya pembinaan dan pengawasan pangan telah melebihi target yang ditetapkan. Capaian kinerja pada sasaran 5 sebesa 87,5% dari target 80%.

Pengunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran dilaksanakan melalui Program Peningkatan Ketahanan Pangan dan Program Mutu dan Keamanan Pangan, dengan Kegiatan:

Peningkatan Ketahanan Pangan	Sertifikasi Pangan Segar (Buah dan Sayur)	Rp.	181.350.000,00
	Pengawasan Keamanan Pangan	Rp.	190.439.200,00
	Peningkatan Kapasitas dan Operasional Pengembangan Kelembagaan DKP	Rp.	150.000.000,00
	Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara	Rp.	340.876.700,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Ketahanan Pangan	Rp.	182.146.500,00
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ketahanan Pangan	Rp.	103.186.700,00
Sub Jumlah		Rp.	*1.147.999.100,00*
Peningkatan mutu dan keamanan pangan	Peningkatan Kompetensi SDM Keamanan Pangan	Rp.	100.000.000,00
Sub Jumlah			*100.000.000,00*

Melalui dua Program tersebut Dinas Ketahanan Pangan telah melakukan upaya dalam rangka tercapainya pembinaan dan pengawasan pangan. Untuk memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan yang beredar di masyarakat dilakukan pemantauan sehingga dapat mencegah terjadinya pencemaran pada pangan di semua rantai distribusi pangan baik di tingkat petani, pengepul dan pedagang. Banyaknya cemaran terutama yang disebabkan oleh penggunaan bahan kimia yang berlebihan dan yang dilarang untuk digunakan dalam pangan dapat menyebabkan keracunan dan menyebabkan sakit pada konsumen. Di Provinsi Riau telah dibentuk Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) Provinsi Riau Peraturan Gubernur Riau Nomor 108 Tahun 2008 Tentang Penunjukan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau sebagai Instansi yang Berwenang (Otoritas Kompeten) dalam Penanganan Keamanan dan Mutu Produk Pangan Hasil Pertanian Tingkat Provinsi Riau. Instansi ini diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan keamanan pangan buah dan sayuran segar.

C. *Realisasi Anggaran*

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau pada Tahun 2017, didukung APBD sebesar Rp. 18.885.125.504,47,-, secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut:

a. Belanja Tidak Langsung, sebesar Rp. 10.215.469.624,0,- digunakan untuk Belanja Gaji, Tunjangan Pegawai dan Tambahan Penghasilan Pegawai.

b. Belanja Langsung, sebesar Rp. 8.669.655.880,47,- digunakan untuk :
   - Belanja Pegawai, sebesar Rp. 509.825.000,00
   - Belanja Barang dan Jasa, sebesar Rp. 7.412.119.520,47
   - Belanja Modal, sebesar Rp. 747.711.360,00,-

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 6.
Sasaran Program dan Persentase Realisasi Anggaran
Badan Ketahanan Pangan Tahun 2017

SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1. Tercapainya Ketersediaan Pangan	Peningkatan Ketahanan Pangan	Analisis Ketersediaan Pangan Wilayah	87.500.400,00	77.542.000,00	88,62
Jumlah			**87.500.400,00**	**77.542.000,00**	**88,62**
2. Tercapainya Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat	Peningkatan Ketahanan Pangan	Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Riau	236.840.350,00	171.092.550,00	72,24
		Pengembangan dan Pemberdayaan ketersediaan pangan sagu sebagai pangan alternatif	676.264.000,00	592.592.050,00	87,63
		Pengembangan dan Pemberdayaan Cadangan Pangan Masyarakat	148.480.000,00	133.735.100,00	90,07
		Pemberdayaan Gapoktan dalam Penyedia Pangan Masyarakat se-Provinsi Riau	176.477.000,00	163.870.300,00	92,86
Jumlah			**1.238.061.350,00**	**1.061.290.000,00**	**85,72**
3. Tercapainya Ketersediaan Informasi, Pasokan, Harga dan Akses Pangan Strategis di Daerah	Peningkatan Ketahanan Pangan	Penguatan Jaringan Distribusi Pangan dan antar Wilayah (Lokal dan Regional)	141.761.900,00	127.836.600,00	90,18
		Pemantauan dan Analisis Akses Harga Pangan Pokok	100.000.000,00	92.083.100,00	92,08
		Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	245.722.100,00	238.891.923,00	97,22

Jumlah			**487.484.000,00**	**458.811.623,00**	**94,12**
4. Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat	Peningkatan Ketahanan Pangan	Gerakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	845.510.000,00	727.872.000,00	86,09
		Lomba Cipta Menu B2SA Tingkat Provinsi dan Nasional	281.473.000,00	222.389.800,00	79,01
		Analisis Situasi Konsumsi Pangan Penduduk	139.910.000,00	116.161.600,00	83,03
		Pengelolaan Pemanfaatan Pekarangan/ Peran Perempuan dalam ketahanan pangan	662.014.850,00	587.559.800	88,75
		Pengembangan Pangan Lokal	104.917.500,00	88.400.000	84,26
Jumlah			**2.033.825.350,00**	**1.742.383.200,00**	**85,67**
5. Tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pangan	Peningkatan Ketahanan Pangan	Sertifikasi Pangan Segar (Buah dan Sayur)	181.350.000,00	143.887.000,00	79,34
		Pengawasan Keamanan Pangan	190.439.200	160.418.791	84,24
		Peningkatan Kapasitas dan Operasional Pengembangan Kelembagaan DKP	150.000.000,00	120.578.500,00	80,39
		Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara	340.876.700,00	305.811.440,00	89,71
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Ketahanan Pangan	182.146.500,00	147.876.500,00	81,19
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ketahanan Pangan	103.186.700,00	43.028.200,00	41,70
	Sub Jumlah		*1.147.999.100,00*	*921.600.431,00*	*80,28*
	Peningkatan mutu dan keamanan pangan Keamanan pangan	Peningkatan Kompetensi SDM Keamanan Pangan	100.000.000,00	83.417.500	83,42
	Sub Jumlah		*100.000.000,00*	*83.417.500,00*	*83,42*
	Pengembangan Data dan Informasi	Penyusunan Statistik Pangan	99.173.500	75.391.500,00	76,02
		Partisipasi dalam Pelaksanaan Pameran Tahunan	352.870.000,00	323.995.767	91,82
		Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Ketahanan Pangan	983.920.220,00	895.102.704,00	90,97
	Sub Jumlah		*1.435.963.720*	*1.294.489.971*	*90,15*
Jumlah			**2.683.962.820,00**	**2.299.507.902,00**	**85,68**
TOTAL			**6.530.833.920,00**	**5.639.534.725,00**	**86,35**

Kegiatan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 10.215.469.624,- terserap Rp 9.857.038.573,- (96,49%), dengan capaian fisik 100%. Belanja Langsung sebesar Rp. 8.669.655.880,47,- terserap Rp. 7.569.413.009,,- (87,31%), dengan capaian fisik 89,49 %.

Realisasi Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 berdasarkan laporan Monev 2017 dapat dilihat pada Lampiran dibawah ini :

Tabel. 7.
REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI RIAU TAHUN 2017
BELANJA LANGSUNG

No	Program Kegiatan	Pagu				Penyerapan Dana				Pelaksanaan Fisik (%)		
		Murni		Perubahan		Target		Realisasi SPJ		Target	Realisasi	Tertimbang
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%			
P	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan**											
1	Rapat Koordinasi Pada Setiap Skpd	300.000.000,00	2,57	313.080.000,00	3,61	313.080.000,00	100	207.967.600,00	66,43	100	75	3
2	Penyusunan Rencana Kerja Skpd	84.146.700,00	0,72	24.146.700,00	0,28	24.146.700,00	100	17.646.600,00	73,08	100	80	0,22
3	Penyusunan Penetapan Kinerja (penja), Rencana Kinerja Tahunan (rkt), Laporan Ekuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (lakip)	31.491.000,00	0,27	16.491.000,00	0,19	16.491.000,00	100	13.800.600,00	83,69	100	90	0,17
4	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	37.373.000,00	0,32	37.373.000,00	0,43	37.373.000,00	100	37.373.000,00	100,00	100	100	0,43
5	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	18.546.000,00	0,16	10.196.300,00	0,12	10.196.300,00	100	10.196.300,00	100,00	100	100	0,12
P	**Program Peningkatan Ketahanan Pangan**				0,00							
6	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Ketahanan Pangan	147.246.200,00	1,26	103.186.700,00	1,19	103.186.700,00	100	43.028.200,00	41,70	100	50	0,6
7	Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Ketahanan Pangan	197.896.500,00	1,70	182.146.500,00	2,10	182.146.500,00	100	147.876.500,00	81,19	100	90	2
8	Penyusunan Peraturan Daerah (perda) Ketahanan Pangan Provinsi Riau	300.000.000,00	2,57	-	0,00	-	0	0,00		0	0	0
9	Analisis Situasi Konsumsi Pangan Penduduk	139.910.000,00	1,20	139.910.000,00	1,61	139.910.000,00	100	116.161.600,00	83,03	100	100	2
10	Pengelolaan Pemanfaatan Pekarangan/peran Perempuan Dalam Ketahanan Pangan	662.014.850,00	5,67	662.014.850,00	7,64	662.014.850,00	100	587.559.800,00	88,75	100	88,75	7
11	Pengembangan Dan Pemberdayaan Ketersediaan Pangan Sagu Sebagai Pangan Alternatif	800.000.000,00	6,86	676.264.000,00	7,80	676.264.000,00	100	592.592.050,00	87,63	100	88,5	7

12	Pengembangan Pangan Lokal	149.917.500,00	1,29	104.917.500,00	1,21	104.917.400,00	100	88.400.800,00	84,26	100	84,26	1
13	Lomba Cipta Menu B2sa Tingkat Provinsi Dan Nasional	288.223.000,00	2,47	281.473.000,00	3,25	281.473.000,00	100	222.389.800,00	79,01	100	83,47	3
14	Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Riau	498.141.950,00	4,27	236.840.350,00	2,73	236.840.000,00	100	171.093.050,00	72,24	100	72,24	2
15	Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan Dan Gizi (skpg)	247.922.400,00	2,13	245.722.100,00	2,83	247.922.400,00	100	238.891.923,00	96,36	100	100	3
16	Penghargaan Adikarya Pangan Nusantara	340.876.700,00	2,92	340.876.700,00	3,93	340.876.700,00	100	305.811.440,00	89,71	100	95	4
17	Pengembangan Dan Pemberdayaan Cadangan Pangan Masyarakat	194.480.000,00	1,67	148.480.000,00	1,71	148.480.000,00	100	133.735.100,00	90,07	100	90	2
18	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	550.000.000,00	4,71	-	0,00	-	0	0,00		0	0	0
19	Pemberdayaan Gapoktan Dalam Penyedia Pangan Masyarakat Se Provinsi Riau	176.477.000,00	1,51	176.477.000,00	2,04	176.477.000,00	100	163.870.300,00	92,86	100	96	2
20	Gerakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang Dan Aman (b2sa)	1.937.164.000,00	16,61	845.510.000,00	9,75	845.510.000,00	100	727.672.000,00	86,06	100	86,09	8
21	Peningkatan Kapasitas Dan Operasional Pengembangan Kelembagaan Dewan Ketahanan Pangan	150.000.000,00	1,29	150.000.000,00	1,73	150.000.000,00	100	120.578.500,00	80,39	100	80,39	1
22	Pengawasan Keamanan Pangan	192.939.200,00	1,65	190.439.200,00	2,20	190.439.200,00	100	160.419.791,00	84,24	100	84,24	2
23	Sertifikasi Pangan Segar (buah Dan Sayur)	198.800.000,00	1,70	181.350.000,00	2,09	172.265.000,00	95	143.887.000,00	83,53	100	79,39	2
24	Analisis Ketersediaan Pangan Wilayah	87.500.400,00	0,75	87.500.400,00	1,01	87.500.400,00	100	77.542.000,00	88,62	100	88,62	0,89
25	Pemantauan Dan Analisis Akses Harga Pangan Pokok	100.000.000,00	0,86	100.000.000,00	1,15	100.000.000,00	100	92.083.100,00	92,08	100	92,08	1
26	Penanganan Daerah Rawan Pangan (pdrp)	99.260.000,00	0,85	-	0,00	-	0	0,00		0	0	0
27	Penguatan Jaringan Ketersidaan Dan Distribusi Pangan Antar Wilayah (lokal Dan Regional)	141.761.900,00	1,22	141.761.900,00	1,64	141.761.900,00	100	127.836.600,00	90,18	100	94	2

P	**Program Pengembangan Data/informasi**				0,00							
28	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Ketahanan Pangan	1.137.675.500,00	9,75	983.920.220,00	11,35	983.920.220,00	100	895.102.704,00	90,97	100	95	11
29	Penyusunan Statistik Pangan	135.621.500,00	1,16	99.173.500,00	1,14	99.173.500,00	100	75.391.500,00	76,02	100	80	0,92
30	Partisipasi Dalam Pelaksanaan Pameran Tahunan	352.870.000,00	3,02	352.870.000,00	4,07	352.870.000,00	100	323.995.767,00	91,82	100	92	4
P	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**		0,00		0,00							
31	Penyediaan Alat Tulis Kantor	76.585.200,00	0,66	76.585.200,00	0,88	76.585.200,00	100	76.561.900,00	99,97	100	100	0,88
32	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	33.376.500,00	0,29	33.376.500,00	0,38	33.376.500,00	100	31.866.000,00	95,47	100	100	0,38
33	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	350.000.000,00	3,00	350.000.000,00	4,04	350.000.000,00	100	339.920.500,00	97,12	100	97,12	4
34	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.250.000,00	0,05	6.250.000,00	0,07	6.250.000,00	100	2.340.000,00	37,44	100	37,44	0,03
35	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	249.250.000,00	2,14	219.500.000,47	2,53	219.500.000,00	100	172.496.184,00	78,59	100	80	2
36	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	290.196.400,00	2,49	290.196.400,00	3,35	290.196.400,00	100	290.196.400,00	100,00	100	100	3
37	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	87.250.500,00	0,75	87.250.500,00	1,01	87.250.500,00	100	87.250.500,00	100,00	100	100	1
38	Penyediaan Makanan Dan Minuman	50.000.000,00	0,43	50.000.000,00	0,58	50.000.000,00	100	38.086.400,00	76,17	100	76,17	0,44
39	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	25.500.000,00	0,22	25.500.000,00	0,29	25.500.000,00	100	23.300.000,00	91,37	100	91,37	0,27
40	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	25.000.000,00	0,21	25.000.000,00	0,29	25.000.000,00	100	24.800.000,00	99,20	100	99,2	0,29
P	**Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur**											
41	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	100.000.000,00	0,86	100.000.000,00	1,15	100.000.000,00	100	98.340.000,00	98,34	100	100	1
42	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	98.186.360,00	0,84	98.186.360,00	1,13	98.186.360,00	100	95.635.000,00	97,40	100	100	1
43	Pengadaan Mebeleur	98.000.000,00	0,84	98.000.000,00	1,13	98.000.000,00	100	96.500.000,00	98,47	100	100	1
44	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	100.000.000,00	0,86	100.000.000,00	1,15	100.000.000,00	100	98.230.000,00	98,23	100	100	1

45	Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan	50.000.000,00	0,43	50.000.000,00	0,58	50.000.000,00	100	43.419.000,00	86,84	100	86,84	0,5
46	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	75.500.000,00	0,65	75.500.000,00	0,87	75.500.000,00	100	75.500.000,00	100,00	100	100	0,87
P	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**											
47	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	52.800.000,00	0,45	-	0,00	-	0	0,00		0	0	0
48	Pembinaan Fisik Dan Mental Aparatur	49.940.000,00	0,43	49.940.000,00	0,58	49.940.000,00	100	46.400.000,00	92,91	100	92,91	0,54
P	**Program Peningkatan Mutu Dan Keamanan Pangan**											
49	Peningkatan Kompetensi Sdm Keamanan Pangan	100.000.000,00	0,86	100.000.000,00	1,15	100.000.000,00	100	83.417.500,00	83,42	100	84	0,97
P	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**											
50	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	50.000.000,00	0,43	2.250.000,00	0,03	2.250.000,00	100	2.250.000,00	100,00	100	100	0,03
	Jumlah	**11.666.090.260,00**	**100,00**	**8.669.655.880,47**	**100,00**	8.662.770.730,00	99,92	7.569.413.009,00	**87,31**	**100**	**89,13**	**89**

BAB IV PENUTUP

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau sebagai SKPD teknis yang memiliki tugas pokok membantu Gubernur dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Ketahanan Pangan dan salah satu fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang ketahanan pangan. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin.

Dengan memperhatiakan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena target sasaran yang dicapai dengan ketegori **Baik**. Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut:

1. Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) secara keseluruhan dicapai 96%, dengan rincian per sasaran yaitu
2. sasaran 1. 129%; sasaran 2. 38,62 %; sasaran 3. 100 %; sasaran 4. 97 %; sasaran 5. 109 %.

B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau di masa mendatang antara lain :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif untuk mewujudkan tertib administrasi perkantoran.

2. Meningkatkan informasi peran Dinas Ketahanan Pangan dalam mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan melalui penyebaran informasi ketahanan pangan di media cetak, elektronik dan media publikasi lainnya di daerah.
3. Meningkatkan efektivitas koordinasi dan sinkronisasi kebijakan baik antar OPD maupun stakeholders lainnya melalui perumusan kebijakan ketahanan pangan sesuai kewenangan masing-masing namun saling mendukung.

Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah Tahun 2017 untuk Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang.

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK)
TAHUN 2017

Instansi : DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI RIAU

PROGRAM	KEGIATAN					PERSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	KET.
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Pengembangan Data dan Informasi	Penyusunan Statistik Pangan	Masukan : Jumlah Dana	Rp	99.173.500	75.391.500,00	76,02	
		Keluaran : Jumlah Buku Statistik Pangan	Buku	1	1	100,00	
		Hasil : Persentase tersedianya data dan infrormasi Statistik Ketahanan Pangan Provinsi Riau bagi publik	%	100	100	100,00	
	Partisipasi dalam Pelaksanaan	Masukan : Jumlah Dana	Rupiah	352.870.000,00	323.995.767	91,82	
	Pameran Tahunan	Keluaran : Jumlah event yang diikuti	Event	3		-	
		Hasil : Persentase penyebaran informasi tentang potensi produk pangan lokal	%	100			
	Pengembangan Sistem Informasi	Masukan : Jumlah Dana	Rupiah	983.920.220,00	895.102.704,00	90,97	
	Ketahanan Pangan	Keluaran : Jumlah Sistem Informasi yang dikembangkan	Sistem	1	1	100,00	
		Hasil : Tersedianya Informasi Ketahanan Pangan melalui Website	bulan	12	12	100,00	
2 Peningkatan Ketahanan Pangan	Analisis Ketersediaan Pangan Wilayah	Masukan : Jumlah Dana	Rupiah	87.500.400,00	77.542.000,00	88,62	
		Keluaran : Jenis kelompok pangan yang dianalisis	Jenis	13		-	
		Hasil : Tingkat Capaian Penyediaan Energi Ketersediaan Pangan Wilayah	%	100		-	
	Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah	Masukan : Jumlah Dana	Rupiah	236.840.350,00	171.092.550,00	72,24	
	Daerah Riau	Keluaran : Jumlah Bantuan Pangan Pokok Beras	Ton	20		-	
		Hasil : Terbantunya masyarakat yang terkena bencana banjir dan kekeringan	Masyarakat kabupaten kota yang berpotensi bencana banjir dan				

PROGRAM	KEGIATAN					PERSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	KET.
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8
			kekeringan				
	Pengembangan dan Pemberdayaan keter sediaan	Masukan : Jumlah Dana	Rupiah	676.264.000,00	592.592.050,00	87,63	
	pangan sagu sebagai pangan alternatif	Keluaran : Jumlah kelompok penerima bantuan	Kelompok	20		-	
		Hasil : Peningkatan SDM pengolah pangan lokal	Orang	75		-	
	Pengembangan dan Pemberdayaan Cadangan Pangan Masyarakat	Masukan : Jumlah Dana	Rupiah	148.480.000,00	133.735.100,00	90,07	
		Keluaran : Jumlah kelompok penerima bantuan	kelompok	19		-	
		Hasil : Tingkat capaian kelompok lumbung yang diberdayakan	%	100		-	
	Pemberdayaan Gapok tan dalam Penyedia Pangan Masyarakat se-Provinsi Riau	Masukan : Jumlah Dana	Rupiah	176.477.000,00	163.870.300,00	92,86	
		Keluaran : Jumlah Gapoktan penerima bantuan	Gapoktan	30		-	
		Hasil : Tingkat harga gabah/beras capaian stabilitas	%	100		-	
	Penguatan Jaringan Distribusi Pangan dan antar Wilayah (Lokal dan Regi	Masukan : Jumlah Dana	Rupiah	141.761.900,00	127.836.600,00	90,18	
		Keluaran : Jumlah jaringan distribusi yang dikerjasamakan	Jaringan	2		-	
		Hasil : Persentase pencapaian distribusi pangan antar wilayah	%	100		-	
	Pemantauan dan Analisis Akses Harga Pangan Pokok	Masukan : Jumlah Dana	Rupiah	100.000.000,00	92.083.100,00	92,08	
		Keluaran : Frekwensi pemantauan dan jenis pangan yang dianalisis	kali	52		-	
			jenis	21		-	
		Hasil : Tersedianya informasi harga pangan	kali	52		-	

PROGRAM	KEGIATAN					PERSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	KET.
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	Masukan : Jumlah Dana	Rupiah	245.722.100,00	238.891.923,00	97,22	
		Keluaran : Jumlah buku SKPG	Judul Buku	1		-	
		Hasil : Persentase pemahaman system kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG) aparat 100%	%	100		-	
	Gerakan Penganekara-gaman Konsumsi Pang-an Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Masukan : Jumlah Dana	Rupiah	845.510.000,00	727.872.000,00	86,09	
		Keluaran : Jumlah peserta gerakan	orang	9.820		-	
		Hasil : Terwujudnya Gerakan Kosumsi Pangan B2SA	Kab/Kota dan Event tertentu	3		-	
	Lomba Cipta Menu B2SA Tingkat Provinsi dan Nasional	Masukan : Jumlah Dana	Rupiah	281.473.000,00	222.389.800,00	79,01	
		Keluaran : Jumlah menu pangan lokal yang dilombakan	Jenis pangan lokal	3		-	
		Hasil : Peserta lomba	Kab/Kota	12		-	
	Analisis Situasi Konsumsi Pangan Penduduk	Masukan : Jumlah Dana	Rupiah	139.910.000,00	116.161.600,00	83,03	
		Keluaran : Jenis kelompok pangan yang dianalisis	Jenis	9		-	
		Hasil : Tersedianya buku analisis pangan masyarakat Provinsi Riau	Buku	1		-	
	Pengelolaan Peman faatan Pekarangan/ Peran Perempuan dalam Ketahanan Pangan	Masukan : Jumlah Dana	Rupiah	662.014.850,00	587.559.800	88,75	
		Keluaran : Jumlah KK yang menerima bantuan	KK	576		-	
		Hasil : Pemanfaatan lahan pekarangan	KK	576		-	
	Pengembangan Pangan Lokal	Masukan : Jumlah Dana	Rupiah	104.917.500,00	88.400.000	84,26	
		Keluaran : Jumlah unit pengolah pangan local	unit	20		-	
		Hasil : Alat pengolah pangan lokal	unit(CP/CL)	20		-	

PROGRAM	KEGIATAN					PERSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	KET.
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Sertifikasi Pangan Segar (Buah dan Sayur	Masukan : Jumlah Dana	Rupiah	181.350.000,00	143.887.000,00	79,34	
		Keluaran : Jumlah sertifikat prima 3	orang	20		-	
		Hasil : Terjaminnya mutu dan keamanan pangan segar	Kab/Kota	12		-	
	Pengawasan Keamanan Pangan	Masukan : Jumlah Dana	Rupiah	190.439.200	160.418.791	84,24	
		Keluaran : Jumlah pengawasan mutu keamanan pangan segar	Sampel	48		-	
		Hasil : Tersedianya pangan segar yang aman untuk dikonsumsi	Provinsi Riau	1		-	
	Peningkatan Kapasitas dan Operasional Pengembangan Kelembagaan DKP	Masukan : Jumlah Dana	Rupiah	150.000.000,00	120.578.500,00	80,39	
		Keluaran : Jumlah rekomendasi	Rekomendasi	2		-	
		Hasil : Rumusan kesepakatan	Rumusan	2		-	
	Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara	Masukan : Jumlah Dana	Rupiah	340.876.700,00	305.811.440,00	89,71	
		Keluaran : 1. Jumlah pemberian penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN)	Kali	1		-	
		2. Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS)	Laporan	1		-	
		Hasil : Tingkat Capaian Motivasi dan Kinerja Aparat/ masyarakat	Kategori	5		-	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencana-an Pembangunan Keta-hanan Pangan	Masukan : Jumlah Dana	Rupiah	182.146.500,00	147.876.500,00	81,19	
		Keluaran : Jumlah Peserta	orang peserta	36	36	100,00	
		Hasil : Tingkat Pencapaian Program Kegiatan Ketahanan Pangan	program	2	2	100,00	

PROGRAM	KEGIATAN					PERSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	KET.
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ketahanan Pangan	Masukan : Jumlah Dana	Rupiah	103.186.700,00	43.028.200,00	41,70	
		Keluaran : Frekuensi Monev yang dilaksanakan	Kali	24	12	50,00	Dana tdk tersedia
		Hasil : Tingkat Capaian Pelaksanaan Kegiatan BKP Prov. Riau di Provinsi dan Kab/Kota	Program	2	2	100,00	
			Kegiatan	20	20	100,00	
3 Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Peningkatan Kompeten-si SDM keamanan Pangan	Masukan : Jumlah Dana	Rupiah	100.000.000,00	83.417.500	83,42	
		Keluaran : Jumlah SDM	Orang	24		-	
		Hasil : Meningkatnya kompetensi SDM keamanan Pangan	Orang	24		-	

Pekanbaru, Desember 2017

Kepala Dinas

PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS KEMAMAN PANGAN

Ir. DARMANSYAH

NIP. 195902071985031009

RENCANA KERJA TAHUNAN PERUBAHAN
TAHUN 2017

Instansi : DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI RIAU

Sasaran			Program	Kegiatan				Ket
Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (Target)		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Tercapainya Ketersediaan Pangan	Jumlah Ketersediaan pangan (Energi) Jumlah Ketersediaan Pangan (Protein)	2.400 63 gr/kap/hr 63 gr/kap/hr	Peningkatan Ketahanan Pangan	Analisis Ketersediaan Pangan Wilayah	Masukan : Jumlah Dana	Rupiah	87.500.400	
					Keluaran : Jenis kelompok pangan yang dianalisis	Jenis	13	
					Hasil : Tingkat Capaian Penyediaan Energi Ketersediaan Pangan Wilayah	%	100	
2. Tercapainya Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat	Jumlah Cadangan Pangan (Beras)	164 ton	Peningkatan Ketahanan Pangan	Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Riau	Masukan : Jumlah Dana	Rupiah	236.840.350,00	
					Keluaran : Jumlah Bantuan Pangan Pokok Beras	Ton	20	
					Hasil : Terbantunya masyarakat yang terkena bencana	Masyarakat kabupaten kota yang berpotensi bencana banjir dan kekeringan		
				Pengembangan dan Pemberdayaan keter-sediaan pangan sagu sebagai pangan alter-natif	Masukan : Jumlah Dana	Rupiah	676.264.000,00	
					Keluaran : Jumlah kelompok penerima bantuan	Kelompok	20	
					Hasil : Peningkatan SDM pengolah pangan lokal	Orang	75	
				Pengembangan dan Pemberdayaan Cadangan Pangan Masyarakat	Masukan : Jumlah Dana	Rupiah	148.480.000	
					Keluaran : Jumlah kelompok penerima bantuan	kelompok	19	
					Hasil : Tingkat capaian kelompok lumbung yang diberdayakan	%	100	
				Pemberdayaan Gapok tan dalam Penyedia Pangan Masyarakat se-Provinsi Riau	Masukan : Jumlah Dana	Rupiah	176.477.000	
					Keluaran : Jumlah Gapoktan penerima bantuan	Gapoktan	30	
					Hasil : Tingkat harga gabah/beras capaian stabilitas	%	100	
3. Tercapainya Ketersediaan Informasi, Pasokan, Harga dan Akses Pangan Strategis di Daerah	Persentase Ketersediaan Informasi Harga Pangan	100%	Peningkatan Ketahanan Pangan	Penguatan Jaringan Distribusi Pangan dan antar Wilayah (Lokal dan Regional)	Masukan : Jumlah Dana	Rupiah	141.761.900	
					Keluaran : Jumlah jaringan distribusi yang dikerjasamakan dikerjasamakan	Jaringan	2	
					Hasil : Persentase pencapaian distribusi pangan antar wilayah	%	100	
				Pemantauan dan	Masukan : Jumlah Dana	Rupiah	100.000.000	

Sasaran			Program	Kegiatan				Ket
Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (Target)		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Analisis Akses Harga Pangan Pokok	Keluaran : Frekwensi pemantauan dan jenis pangan yang	kali jenis	52 21	
					Hasil : Tersedianya informasi harga pangan	kali jenis	52 21	
				Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	Masukan : Jumlah Dana	Rupiah	245.722.100,00	
					Keluaran : Jumlah buku SKPG	Judul Buku	1	
					Hasil : Persentase pemahaman system kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG) aparat 100%	%	100	
4. Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat	Jumlah Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Jumlah Konsumsi Energi, Jumlah Konsumsi Pangan	82,5 2.150 Kkal/ Kap/Hari 57 Gram/ Kap/Hari	Peningkatan Ketahanan Pangan	Gerakan Penganekara-gaman Konsumsi Pang-an Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Masukan : Jumlah Dana	Rupiah	845.510.000,00	
					Keluaran : Jumlah peserta gerakan	orang	9.820	
					Hasil : Terwujudnya Gerakan Kosumsi Pangan B2SA	Kab/Kota dan Event tertentu	3	
				Lomba Cipta Menu B2SA Tingkat Provinsi dan Nasional	Masukan : Jumlah Dana	Rupiah	281.473.000,00	
					Keluaran : Jumlah menu pangan lokal yang dilombakan	Jenis pangan lokal	3	
					Hasil : Peserta lomba	Kab/Kota	12	
				Analisis Situasi Konsumsi Pangan Penduduk	Masukan : Jumlah Dana	Rupiah	139.910.000	
					Keluaran : Jenis kelompok pangan yang dianalisis	Jenis	9	
					Hasil : Tersedianya buku analisis pangan masyarakat Provinsi Riau	Buku	1	
				Pengelolaan Peman faatan Pekarangan/ Peran Perempuan dalam Ketahanan Pangan	Masukan : Jumlah Dana	Rupiah	662.014.850	
					Keluaran : Jumlah KK yang menerima bantuan	KK	576	
					Hasil : Pemanfaatan lahan pekarangan	KK	576	
				Pengembangan Pangan Lokal	Masukan : Jumlah Dana	Rupiah	104.917.500,00	
					Keluaran : Jumlah unit pengolah pangan local	unit	20	
					Hasil : Alat pengolah pangan lokal	unit(CP/CL)	20	
5. Tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pangan	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan	80%	Peningkatan Ketahanan Pangan	Sertifikasi Pangan Segar (Buah dan Sayur	Masukan : Jumlah Dana	Rupiah	181.350.000,00	
					Keluaran : Jumlah sertifikat prima 3	orang	20	

Sasaran			Program	Kegiatan				Ket
Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (Target)		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Hasil : Terjaminnya mutu dan keamanan pangan segar	Kab/Kota	12	
				Pengawasan Keamanan Pangan	Masukan : Jumlah Dana	Rupiah	190.439.200,00	
					Keluaran : Jumlah pengawasan mutu keamanan pangan segar	Sampel	48	
					Hasil : Tersedianya pangan segar yang aman untuk dikonsumsi	Provinsi Riau	1	
			Peningkatan mutu dan keamanan pangan	Peningkatan Kompeten-si SDM keamanan Pangan	Masukan : Jumlah Dana	Rupiah	100.000.000	
					Keluaran : Jumlah SDM	Orang	24	
					Hasil : Meningkatnya kompetensi SDM keamanan Pangan	Orang	24	
			Peningkatan Ketahanan Pangan	Peningkatan Kapasitas dan Operasional Pengembangan Kelembagaan DKP	Masukan : Jumlah Dana	Rupiah	150.000.000,00	
					Keluaran : Jumlah rekomendasi	Rekomendasi	2	
					Hasil : Rumusan kesepakatan	Rumusan	2	
				Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara	Masukan : Jumlah Dana	Rupiah	340.876.700	
					Keluaran : 1. Jumlah pemberian penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN)	Kali	1	
					2. Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS)	Laporan	1	
					Hasil : Tingkat Capaian Motivasi dan Kinerja Aparat/ masyarakat	Kategori	5	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Perencana-an Pembangunan Keta-hanan Pangan	Masukan : Jumlah Dana	Rupiah	182.146.500	
					Keluaran : Jumlah Peserta	orang peserta	36	
					Hasil : Tingkat Pencapaian Program Kegiatan Ketahanan Pangan	program	2	
				Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ketahanan Pangan	Masukan : Jumlah Dana	Rupiah	103.186.700,	
					Keluaran : Frekuensi Monev yang dilaksanakan	Kali	24	
					Hasil : Tingkat Capaian Pelaksanaan Kegiatan BKP Prov. Riau di Provinsi dan Kab/Kota	Program Kegiatan	2 20	

Sasaran			Program	Kegiatan				Ket
Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (Target)		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Pengembangan Data dan Informasi	Penyusunan Statistik Pangan	Masukan : Jumlah Dana	Rp	99.173.500,00	
					Keluaran : Jumlah Buku Statistik Pangan	Buku	1	
					Hasil : Persentase tersedianya data dan infrormasi Statistik Ketahanan Pangan Provinsi Riau bagi publik	%	100	
				Partisipasi dalam Pelaksanaan Pameran Tahunan	Masukan : Jumlah Dana	Rupiah	352.870.000	
					Keluaran : Jumlah event yang diikuti	Event	3	
					Hasil : Persentase penyebaran informasi tentang potensi produk pangan lokal	%	100	
				Pengembangan Sistem Informasi Ketahanan Pangan	Masukan : Jumlah Dana	Rupiah	983.920.220,00	
					Keluaran : Jumlah Sistem Informasi yang dikembangkan	Sistem	1	
					Hasil : Tersedianya Informasi Ketahanan Pangan melalui Website melalui website	bulan	12	